

**PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DALAM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN MERAUKE
PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan sebagai upaya untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum
Universitas Jambi



Oleh :

Vacia Magista Putri Fachiri

NIM : H1B118047

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN
TAHUN 2024**

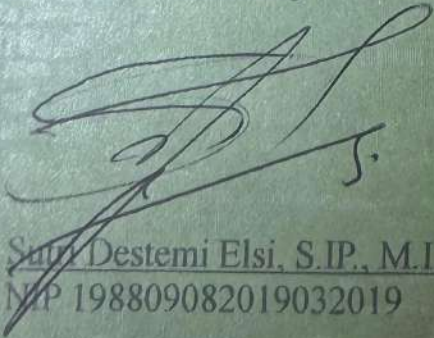
Nama : Vacia Magista Putri Fachiri
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B118047

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 untuk
diajukan ke Sidang Skripsi pada Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Hukum Universitas Jambi

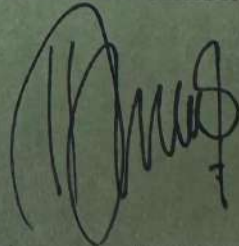
Jambi, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing 1



Satri Destemi Elsi, S.IP., M.I.P.
NIP 198809082019032019

Dosen Pembimbing 2



Dimasrizal, S.SOS., M.Si.
NIP198904172024211001

LEMBAR PENGESAHAN

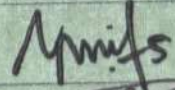
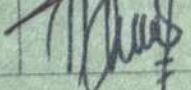
PARTISIPASI PEMILIH LAKI-LAKI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024

Nama : Vacia Magista Putri Fachiri
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
NIM : H1B118047

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Sidang
Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jambi, 30 Juni 2025

Dewan Penguji Sidang Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ian Pasaribu, S.I.P., M.Si.	Penguji Utama	
2.	Sutri Destemi Elsi, S.IP., M.I.P.	Pembimbing Utama	
3.	Dimasrizal, S.SOS., M.Si.	Pembimbing Pendamping	

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hartati, S.H., M.H.
NIP. 197212031998022001

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan Puji Syukur Kepada Tuhan Yesus

Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:

Alm. Ayah Tercinta

Ibunda Tercinta

Adik-adik terkasih

Keluarga besar tercinta

Motto

*“Jangan bandingkan proses mu dengan orang lain,
dirimu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat
dirimu berada pada waktumu sendiri”*

SURAT PERNYATAAN

Nama : Vacia Magista Putri Fachiri
NIM : H1B118047
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Partisipasi Pemilih Laki-Laki Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
Alamat : Kost Aryani, Jln. Flamboyan, Mendalo Asri
No. Hp : 082315369712

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari hasil karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Jambi, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Jambi, 18 Mei 2025

Vacia Magista Putri Fachiri
H1B118047

Abstract

This study focuses on the problem of there are still people who have the right to vote but do not use it. The purpose of this study was to determine the level of male voter participation in the 2024 Merauke Regency Regional Head Election, South Papua Province. Factors that influence male voter participation and efforts made to increase male voter participation in the Merauke Regency Regional Head Election, South Papua Province. The method used in this study is descriptive qualitative. The data collection process was carried out by conducting interviews with the Commissioners of the South Papua Provincial General Election Commission and interviews with Political Party Members. The results of the study showed low voter participation in the Merauke Regency regional head election because the public had lost trust in the regional head candidates supported by political parties.

Intisari

Penelitian ini berfokus pada permasalahan masih terdapat masyarakat yang memiliki hak pilih namun tidak menggunakannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih laki-laki dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih laki-laki serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih laki-laki dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan serta wawancara dengan Anggota Partai Politik. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke karena sudah hilang rasa kepercayaan masyarakat terhadap calon-calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Maha Esa karena berkat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul. **“Partisipasi Pemilih Laki-laki Di Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan 2024”**. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjadi seorang sarjana yang berkompeten dan untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempatan proposal ini. Penulis hendak memberikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H, M.H Rektor Universitas Jambi yang telah menyediakan sarana dan prasarana kepada mahasiswa Universitas Jambi melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dan ditetapkan serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Jambi.
2. Ibu Dr. Hartati, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama penulis melaksanakan studi di Universitas Jambi.

3. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi yang telah memberikan bantuan kelancaran perihal akademik dan administrasi.
4. Bapak Dr. H. Umar, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang telah membantu kelancaran finansial penulis dan sarana di Fakultas Hukum sehingga kegiatan perkuliahan dapat terselenggara dengan baik.
5. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah membantu dan memberikan kelancaran atas segala urusan penulis dalam bidang kemahasiswaan.
6. Bapak Rio Yusri Maulana, S.IP., M.I.Pol., Ph.D. Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran serta dorongan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Sutri Destemi Elsi, S.IP., M.I.P, Sektretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi, yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi agar dapat menjadi sarjana yang berkualitas dan berintegritas. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran serta dorongan motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Hatta Abdi Muhammad, S.IP., M.I.P. Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Jambi yang telah memberikan dukungan saran serta arahan selama menempuh masa studi.
9. Bapak Dimasrizal, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing 2 skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing saya pada penulisan dan penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan hingga sejauh ini.
10. Bapak Ian Pasaribu, S.I.P., M.Si. selaku dosen penguji penulis pada skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam menguji penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan dilingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
12. Almarhum ayah tercinta, John Robert Fachiri, S.H yang menjadi motivasi utama penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Ini hadiah spesial untukmu papa, tenang dan bahagia di surga.
13. Evi Tasriani, S.PD., M.M selaku ibu terkasih yang selalu menjadi tiang doa bagi penulis dan mendukung penulis hingga menyelesaikan ini.
14. (Purn) KOMJEN POL Mathius D Fakhiri, S.I.K., M.H. selaku paman yang senantiasa mendukung dan membantu penulis dalam segala hal sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

15. Keluarga besar Aragae Cigombong yang selalu memberikan dukungan dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Celine Kakuhe, S.Tr.IP dan Stephanie Ajomi, S.Pd selaku sahabat sekaligus saudara yang selalu mendukung, menyemangati, mendoakan, serta mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Sri Dewi Monalisa Siahaan S.Sos yang telah menemani penulis dari semester awal sampai saat ini, serta menemani saya bimbingan tugas akhir.
18. Lilis Sartika Manik S.Sos yang telah membantu penulis dari awal semester hingga saat ini.
19. Thierry Sigare Henry Aragae yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan sampai penulisan skripsi saat ini.
20. Umah Ria Bauw dan Novalia Msen selaku adik terkasih yang selalu menemani dan memberikan semangat pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak dalam segala bantuan, dukngn, semangat dan doanya.

Semoga atas bantuan dari semua pihak baik secara moril maupun materil akan mendapatkan balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Jambi, 17 Mei 2025

Penulis
Vacia Magista Putri Fachiri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRACT	vii
INTISARI	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11

1.5 Landasan Teori.....	11
1.5.1 Partisipasi Politik	11
1.5.2 Bentuk-bentuk partisipasi politik	12
1.6 Kerangka Pikir	15
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.7.1 Jenis Penelitian.....	17
1.7.2 Lokasi Penelitian.....	19
1.7.3 Fokus Penelitian.....	19
1.7.4 Sumber Data.....	19
1.7.5 Teknik Penentuan Informan	20
1.7.6 Teknik Pengumpulan Data	22
1.7.7 Teknik Analisis Data	28
1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi	30
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	32
2.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Selatan Dan Kabupaten Merauke	32
2.1.1 Perspektif Sejarah Provinsi Papua Selatan.....	32
2.1.2 Gambaran Geografis	35
2.1.3 Penduduk Papua Selatan	36
2.1.4 Luas Wilayah.....	37
2.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	38

2.2.1 Gambaran Organisasi	38
2.2.2 Tugas dan Kewenangan KPU Kabupaten Merauke	40
2.2.3 Struktur KPU Kabupaten Merauke	44
2.3 Bakal Calon Gubernur	44
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	47
3.1 Faktor Penyebab Tingkat Partisipasi Pemilih Laki-Laki di Papua Selatan Rendah.....	47
3.1.1 Kegiatan Pemilihan	52
3.1.2 <i>Lobbying</i>	53
3.1.3 Kegiatan Organisasi	56
3.1.4 Mencari Koneksi	57
3.1.5 Tindak Kekerasan	59
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kab. Merauke 2021	5
Tabel 1.2 Presentase Penduduk Laki-laki Kab. Merauke	5
Tabel 1.3 Daftar Pemilih Tetap Kab. Merauke	8
Tabel 1.4 Pengguna Hak Pilih	8
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	14
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin Papua Selatan	37
Gambar 2.2 Wilayah Papua Selatan	37
Gambar 2.3 Bakal Calon Darius Gewilon dan Yusak Yaluwo	44
Gambar 2.4 Bakal Calon Nikolaus Kondomo dan Haji Baidin Kurita	45
Gambar 2.5 Bakal Calon Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak	45
Gambar 2.6 Bakal Calon Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan era reformasi demokrasi mengalami perubahan dan corak yang berbeda. Praktek demokrasi berdasar UUD mengalami perkembangan demokrasi dalam tiga masaa.

Pertama masa Republik Indonesia I, yaitua masa demokrasi yang menonjol peran parlemen serta partai-partai yang ada pada masa itu dinamai demokrasi parlementer; kedua masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya yang menunjukkan aspek demokrasi rakyat; ketiga masa Republik Indonesia III, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional menonjolkan demokrasi presidensiil, masa ini berakhir bersamaan dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang kemudian demokrasi Indonesia memasuki era baru yang di sebut era reformasi, yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan menonjolkan kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil.¹

Setelah masa reformasi kita tahu bahwa banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang Perempuan. Isu-isu seputar Perempuan tidak akan pernah habis

¹ Cory Noviati, “*Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*”. Jurnal Konstitusi. Vol. 10 No. 2, 2013, hal. 336.

untuk dibicarakan oleh para pemikir, baik para agamawan maupun pemikir sekuler. Pada abad pertengahan dan era modern telah menghasilkan teori yang berbeda di masyarakat tentang eksistensi kaum Perempuan. Kehadiran kaum Perempuan ditengah-tengah masyarakat memiliki fungsi serta peranan yang sangat penting. Akan tetapi yang terjadi adalah peran penting Perempuan tidak menjadi perhatian lebih sehingga masyarakat tidak menyadari pentingnya peran tersebut. Akibatnya Perempuan bisa menjadi kaum yang termarginalkan.²

Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum Perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis politik perempuan, dosen, Perempuan parlemen, kader Perempuan partai politik dan lain sebagainya. Sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena Perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap Perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Peran Perempuan dalam pembangunan ini dilandasi untuk kepentingan perempuan itu sendiri, adanya tuntutan peran Perempuan dalam Pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar, tidak hanya disitu saja Perempuan didorong melangkah ke dunia politik sebagai keterwakilan dari

² Anifatul Kiftiyah, "Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia". Vol. 14 No. 1, 2019, hal. 2.

kaumnya dalam mengambil Keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak kaum Perempuan. Akan tetapi, peren tersebut dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik. Saat ini Perempuan masih hanya dalam tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum, namun pada tahap berikutnya Perempuan diharapkan mampu meningkatkan angka keterwakilan Perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih belum mencapai target yakni 30 persen.

Jumlah penduduk Indonesia yang berjenis kelamin Perempuan saat ini sebanyak 131,9 juta jiwa, dan Perempuan yang duduk di parlemen hanya 97 orang saja yang mewakili penduduk yang berjenis kelamin Perempuan dan 17,3 persen dari total keseluruhan anggota DPR RI. Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan : menyertakan paling sedikit 30 persen (tiga puluh persen) keterwakilan Perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Kebijakan keterwakilan Perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi Perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap Perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan Perempuan di parlemen.³

³ Riski Priandi dan Kholis Roisah, "*Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*". Vol. 1 No. 1, 2019, hal. 107-109.

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten yang ditetapkan sebagai wilayah kedudukan ibu Kota Provinsi Papua Selatan yang dimekarkan dari Provinsi Papua bersama tiga provinsi lainnya yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Pemekaran provinsi Papua Selatan awalnya direncanakan akan terdiri atas lima kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Merauke. Atas dasar pertimbangan wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang kemudian memilih undur diri. ⁴

Bertambahnya penduduk maka secara langsung dapat mempengaruhi kepadatan penduduk per wilayah. Berdasarkan data penduduk yang dibandingkan luas wilayah, diketahui kepadatan penduduk Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 sebesar 7,27 jiwa/km². Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi terdapat di Kabupaten Mappi yaitu 13,06 jiwa/km². Sedangkan untuk kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Merauke.⁵

1.1. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Selatan Tahun 2021

Kabupaten	Jumlah Penduduk (ribu)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Merauke	122.335	109.361	231.696

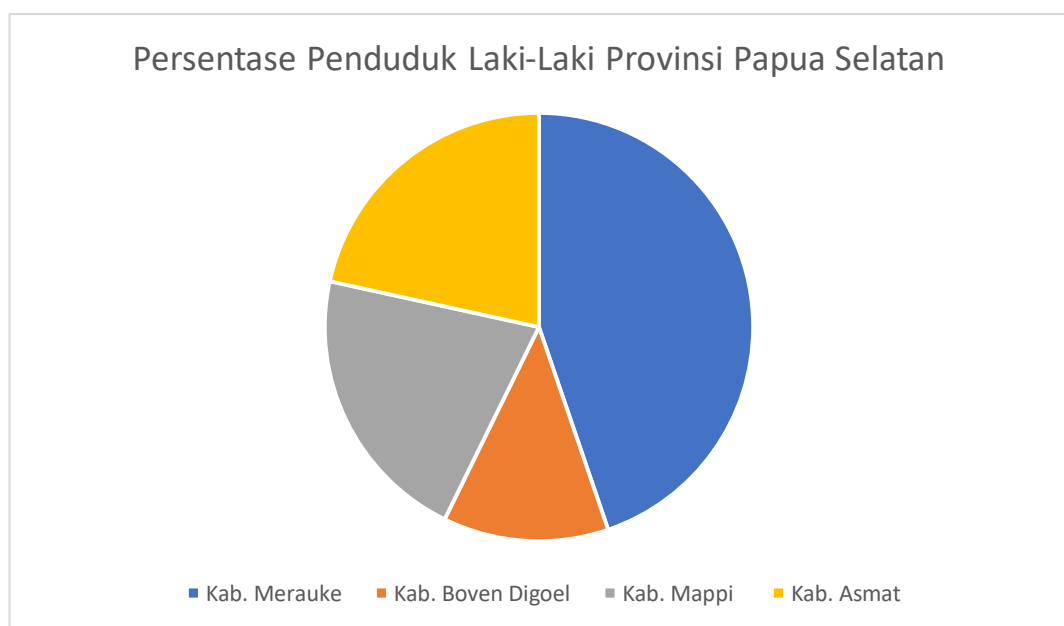
⁴ Pemerintah Provinsi Papua Selatan, “*Sejarah Provinsi Papua Selatan*”, (<https://papuaselatan.go.id/profil/sejarah> , Diakses pada 15 Desember 2024, 08:20)

⁵ Pemerintah Provinsi Papua Selatan, “*Kependudukan Papua Selatan*”, (<https://papuaselatan.go.id/profil/sejarah> , Diakses pada 15 Desember 2024, 08:25)

Boven Digoel	34.170	30.546	64.716
Mappi	57.858	51.721	109.579
Asmat	58.942	52.690	111.632
Total	273.305	244.318	517.623

*Sumber: Pemerintah Provinsi Papua Selatan

1.2 Tabel Persentase Penduduk Laki-Laki Provinsi Papua Selatan



Salah satu bentuk kekhususan Provinsi Papua yakni keberadaan Majelis Rakyat Papua. Dalam UU Otonomi Khusus (Otsus), disebutkan bahwa MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemanyapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam UU Otsus.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Otsus, MRP mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP;
- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang di usulkan oleh DPRP;
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang diajukan oleh DPRP Bersama-sama dengan Gubernur.
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku di Provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkur hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Pelaksanaan tugas dan wewenang MRP secara lebih rinci selanjutnya diatut dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus). MRP juga memiliki hak-hak yang terdiri dari hak secara kelembagaan dan hak keanggotaan.

Hak lembaga MRP meliputi:

- a. Meminta keterangan kepada Pemerintah Provinsi Papua, Kabupaten/Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- b. Meminta peninjauan kembali Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) atau Keputusan Gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- c. Mengajukan rencana Anggaran Belanja MRP kepada DPRD sebagai satu kesatuan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua; dan
- d. Menetapkan peraturan tata tertib MRP

Sementara itu, hak anggota MRP terdiri dari:

- a. Mengajukan pertanyaan;
- b. Menyampaikan usul dan pendapat;
- c. Imunitas;
- d. Protokol; dan
- e. Keuangan/administrasi.⁶

⁶ A. Sakti R.S. Rakia, "Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdasus". Jurnal Justisi Vol. 7, No. 1, Hal 18-19

Kehadiran MRP di Provinsi Papua, jika diamati melalui latar belakang Undang-Undang Otsus Papua, diakui merupakan suatu lembaga yang memiliki peran dan fungsi yang amat berarti. Meskipun sebagai lembaga kultural dan tidak memiliki fungsi legislasi, namun MRP sebetulnya tiak jauh berbeda dengan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang sama-sama sebagai lembaga perwakilan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang diwakilinya. Secara politis, kedua lembaga tersebut sama-sama memperjuangkan kepentingan masyarakat, hanya saja keduanya memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Jika DPRP selama ini sebagai lembaga politik, yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara luas, naming MRP sebuah lembaga kultural yang secara khusus memperjuangkan masyarakat asli Papua. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 6 ayat (5) UU Otsus Papua, dimana MRP berfungsi untuk memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli papua, serta memfasilitasi tingkat lanjut penyelesaiannya.⁷

1.3 Tabel Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Merauke 2024

Kabupaten	Jumlah Distrik	Jumlah Kel/Kamp	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
Merauke	22	190	86.170	81.937	168.107

*) Sumber: KPU Provinsi Papua Selatan (diolah dan dikaji oleh penulis)

⁷ Ode Jamal dan Senalince Mara, “Politik Kewargaan Multikulturalisme (Studi Kasus Tentang Peran Majelis Rakyat Papua dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat Papua Era Otonomi Khusus)”, Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, hal. 157-158.

1.4 Tabel Pengguna Hak Pilih Kabupaten Merauke 2024

Kabupaten	Pengguna Hak Pilih	
	Laki-Laki	Perempuan
Merauke	54.241	56.400

*) Sumber: KPU Provinsi Papua Selatan (diolah dan dikaji penulis)

Selama ini selalu kita lihat bahwa partisipasi politik perempuan memiliki angka yang cukup signifikan rendah dibandingkan dengan partisipasi politik laki-laki. Namun pada penelitian ini penulis melihat bahwa pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan justru tingkat partisipasi politik perempuan memiliki angka yang lebih tinggi dengan presentase 33,55% sedangkan laki-laki memiliki presentase 32,26% dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke. Dengan jumlah penduduk laki-laki yang lebih tinggi dibandingkan perempuan namun memiliki partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah yang lebih rendah dibandingkan perempuan menjadi faktor utama mengapa penulis ingin melihat dan mengkaji lebih dalam lagi apa yang membuat partisipasi laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu yang berkala juga menjadi prasyarat sistem politik demokrasi karena pemilu merupakan salah satu sarana kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih wakil dan pemimpin mereka untuk menjalankan pemerintahan.

Tindakan kekerasan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di Papua tidak hanya terjadi pada Kabupaten Merauke saja yang terjadi secara verbal atas dasar tindakan ancaman. Namun, pada Kabupaten Mamberami Tengah, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Puncak Jaya juga terjadi kekerasan sampai pada dengan memakan sejumlah korban Jiwa. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Kepolisian Daerah Papua, Kombes Ignatus Benny Ady Prabowo menjelaskan bahwa bentrok yang terjadi antar massa terkait pilkada di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah ini merupakan masa pendukung calon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 1 dengan massa pendukung pasangan calon nomor urut 2 di Kantor KPU Puncak Jaya. Bentrokan yang terjadi di halaman Kantor KPU Puncak Jaya ini melua hingga ke perempatan Kios Jimmy dan jalan ke arah kompleks Kuburan 7. Benny menyampaikan bahwa masa kedua kubu ini saling melemparkan umpatan yang berujung saling serang fisik menggunakan alat perang berupa busur pana, serta parang di daerah Distrik Irimuli. Pada kerusuhan pertama yang terjadi di Distrik Irimuli berhasil dilerai oleh aparat keamanan namun terjadi lagi aks susulan antara kedua massa ini yang menyebabkan 40 unit rumah dan 1 honai terbakar, terdapat 94 orang luka-luka terkena panah.⁸

Untuk memperkuat pemahaman penulis, melihat dari penelitian sebelumnya yaitu dari Juan Kahlil Gandeguay yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam pemilihan Kepala Daerah Di Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama,

⁸ Theo Kelen, “Sejumlah Insiden Terjadi Saat Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024 di Tanah Papua”, (<https://jubi.id/polhukam/2024/sejumlah-insiden-terjadi-saat-pemungutan-suara-pilkada-serentak-2024-di-tanah-papua/>), diakses pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 10:26)

masyarakat kabupaten Mimika mengalami ketidakpercayaan pada calon kepala daerah dikarenakan tidak adanya kesejahteraan atau sumbangsih yang signifikan dari kepala daerah sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat menjadi enggan untuk memberikan hak suaranya kepada calon kepala daerah. Kedua, masyarakat tidak dapat meninggalkan pekerjaannya. Ini merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat tidak dapat memberikan hak suaranya dalam proses pemilihan kepala daerah. Dikarenakan, pekerjaan merupakan suatu hal yang penting dan apabila ditinggalkan dapat mengganggu kebutuhan pokok masyarakat. Ketiga, masyarakat tidak mendapatkan hak suara atau masyarakat tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap.

Sebagaimana telah penulis uraikan diatas, yang membedakan penulis dengan penelitian terdahulu ini ialah, pada penelitian terdahulu penulis hanya membahas mengenai partisipasi politik perempuan pada pemilihan kepala daerah di kabupaten Mimika. Sedangkan, penelitian ini penulis membahas mengenai Partisipasi Pemilih Laki-laki di Papua Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Merauke.

Melalui latar belakang inilah penulis hendak melakukan penelitian skripsi di Kabupaten Merauke dengan judul **“Partisipasi Pemilih Laki-laki Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalahnya yaitu mengapa tingkat partisipasi politik laki-laki pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan rendah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penyebab rendahnya partisipasi politik laki-laki dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Aspek teoritis, bermanfaat dalam menambah wawasan pengetahuan.

Sebagai tambahan literatur atau bahan kajian ilmiah dalam bidang ilmu politik yang berkaitan dengan institusi ilmu politik, memberikan informasi terkait rendahnya partisipasi politik laki-laki dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pemilihan kepala daerah pada tahun yang mendatang dalam peningkatan partisipasi politik laki-laki di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut

menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini, parta politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota dan anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan memengaruhi proses politik. Jadi, partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi daripada dalam sistem politik totaliter karena sistem politik yang terakhir ini lebih mengharapkan ketaatan dari para warga daripada aktivitas mandiri.⁹

Kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, ada pilihan untuk diri sendiri dan pilihan untuk lingkungan sekitar. Setiap individu yang tinggal bersama individu lainnya wajib untuk berpartisipasi menentukan pilihan yang berpengaruh dalam hidupnya maupun lingkungan masyarakat. Berawal dari kajian tentang keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan perpolitikan yang sebelumnya terfokuskan hanya ke partial politik yang menjadi ujung tombak pelaksanaan perpolitikan, kini sering

⁹ Ramalan Surbaktim, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 151

berjalannya waktu terdapat banyak kalangan masyarakat yang tertarik untuk terlibat pada tahapan penyusunan maupun penentuan kebijakan publik.¹⁰

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.¹¹

1.5.2 Bentuk- Bentuk Partisipasi Politik

Teori bentuk-bentuk partisipasi politik yang digunakan peneliti untuk menganalisa temuan penelitian adalah teori yang digunakan oleh P. Huntington, Joan Nelson dan Gabriel Almond, dalam bagian ini penelitian memaparkan beberapa teori bentuk-bentuk partisipasi politik.

P Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya mengemukakan ada beberapa bentuk partisipasi politik yang dapat dilakukan, bentuk partisipasi tersebut yaitu:

a. Kegiatan Pemilihan

Tidak hanya meliputi pemberian dukungan dalam bentuk suara, kegiatan pemilihan ini terdapat berbagai macam jenis yaitu, memberikan dukungan dengan cara berkampanye, mencari dukungan seorang calon, dan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

b. *Lobbying*

¹⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 367.

¹¹ Ramalan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal 140.

Lobbying merupakan perilaku seseorang atau kelompok agar dapat membuat hubungan dengan pejabat-pejabat pemerintah dan para elit politik dengan maksud mempengaruhi keputusan atau kebijakan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat banyak.

c. Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi ini lebih banyak yang berkaitan dengan partisipasi seseorang dalam mengikuti suatu organisasi yang dengan tujuan untuk mempengaruhi sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

d. Mencari Koneksi

Merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya yang dimaksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.

f. Tindak Kekerasan

Tindak kekerasan juga merupakan satu bentuk partisipasi politik, yang biasa digunakan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikan sebagai satu kategori tersendiri: artinya, sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan-keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta beda.¹²

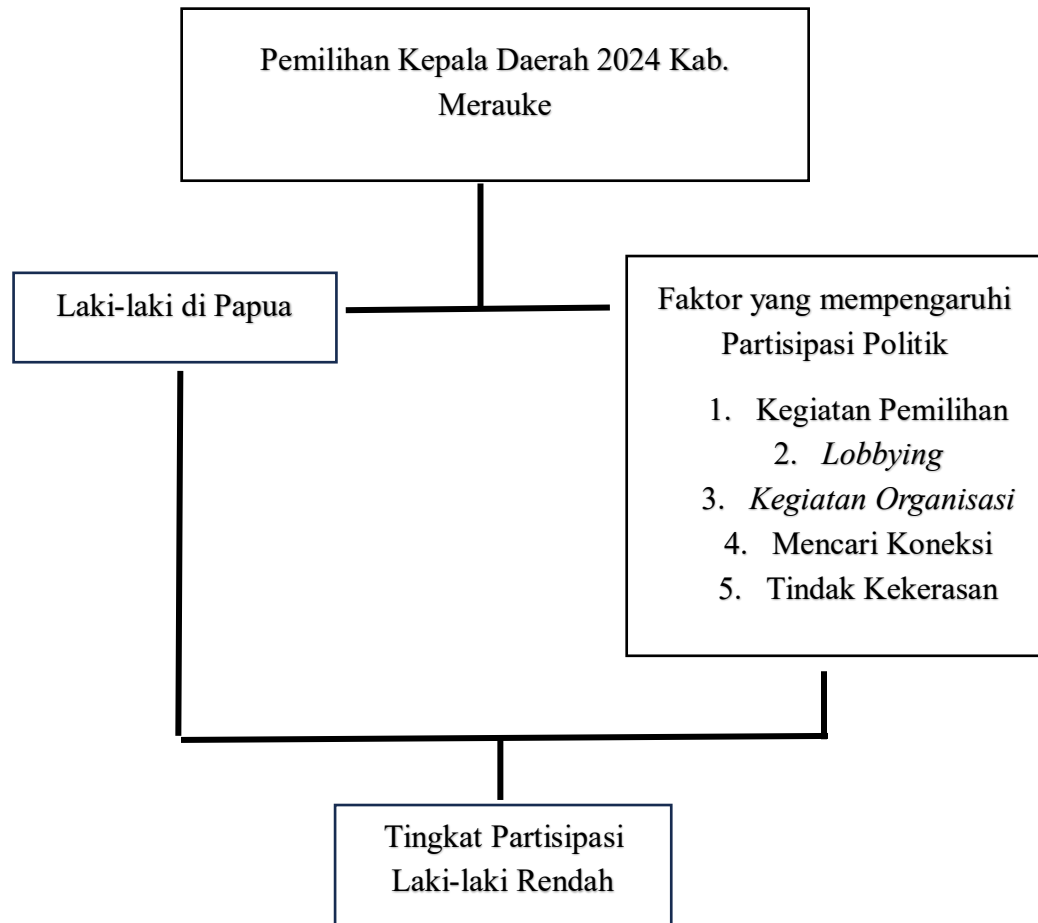
Menurut Rahman dalam bukunya *Sistem Politik Indonesia* kegiatan politik memiliki berbagai macam bentuk partisipasi politik. Perwujudannya di beberapa negara dan periode bisa dikategorikan dalam dua bagian, yaitu aktivitas politik

¹² Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal 16.

konvensional atau non konvensional, baik kegiatan yang sah secara hukum serta yang tidak, dipenuhi tindakan brutal, ataupun yang bersifat revolusi.¹³

¹³ Rahman H. *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 287.

1.6 Kerangka Pikir



Dalam uraian teori yang telah dikemukakan, penulis akan mengkaji tentang partisipasi politik laki-laki dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penulis akan menggunakan empat aspek partisipasi politik yang terdiri dari : (1) Memberikan suara dalam pemilihan Kepala Daerah dimana keterlibatan kaum laki-laki dalam proses memberikan suara, keaktifan dan keterlibatan laki-laki dalam pemilihan Kepala Daerah; (2) Menghadiri rapat umum dimana keterlibatan laki-laki dalam panitia pemilihan

menghadiri rapat-rapat kepanitiaan pemilihan dan juga rapat tim sukses demi kelancaran pemilihan; (3) Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan dimana kegiatan politik dengan masuk menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan tertentu; (4) Mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dimana tindakan aktif laki-laki terhadap tokoh-tokoh masyarakat dengan maksud memperoleh manfaat bagi salah satu tim sukses.

Selain itu akan dikaji pula faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik laki-laki dapat dilihat pada 3 terdiri dari: (1) Kegiatan pemilihan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan hak suara mereka dalam memilih pemimpin sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang dicari oleh masyarakat; (2) Aspek kesadaran politik ini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll; (3) *Lobbying* merupakan suatu aspek yang dilakukan oleh partai politik dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah untuk memberikan pengetahuan serta pengertian akan hak dan kewajiban dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan Kepala Daerah untuk menentukan pejabat yang akan memimpin mereka selama masa jabatannya; (4) Mencari Koneksi yang dimaksud ialah suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak; (5) Tindak Kekerasan yang dimaksud ialah ketidakpuasan rakyat terhadap demokratisasi khususnya dalam penyelenggaraan

pemilukada dimulai dari daftar pemilih yang kurang akurat sehingga menyebabkan banyak pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, pemilih ganda, persoalan pencalonan misalnya dugaan terhadap penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh calon, pembelian suara secara masif, curi start kampanye, melakukan politik uang menjelang hari H pemungutan suara, penyelenggara pemilukada dan aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral, sampai dengan kerancuan dalam rekapitulasi penghitungan suara.

Dengan penjelasan di atas maka penulis ingin mengetahui penyebab rendahnya partisipasi pemilih laki-laki dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan. Dengan aspek-aspek yang sudah dijelaskan oleh penulis di atas mengapa tingkat partisipasi pemilih laki-laki di Kabupaten Merauke lebih rendah dibandingkan partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Merauke.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan sifat dan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik. Berikut adalah beberapa definisi penelitian kualitatif yang didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Mulyana mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian. Menurut Creswell W. menyatakan bahwa *“a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meaning meaning of individual experiences, meaning socially and historically constructed, with an intent of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e. political, issue-oriented, collaborative or change oriented) or both”*. Artinya bahwa pendekatan kualitatif merupakan pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu) atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi atau perubahan); atau keduanya. Hal tersebut di atas menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun peneliti melalui interpretasi dengan mengacu pada berbagai perspektif dan informasi apa adanya dari subjek penelitian. Berbagai sumber data seperti catatan observasi, catatan wawancara,

pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk mendukung terbentuknya interpretasi tersebut.¹⁴

Metode ini digunakan karena peneliti ingin mengungkapkan permasalahan yang sifatnya aktual dan factual, juga bertujuan untuk mengungkapkan dan menggambarkan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Partisipasi Pemilih Laki-Laki Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang mengkaji “Partisipasi Pemilih Laki-Laki Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan” ini mengambil Lokasi di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan sebagai kota penelitian penulis. Penulis mengambil Merauke sebagai tempat penilitan penulis dikarenakan akses internet yang mudah untuk penulis jangkau dalam melaksanakan penelitian ini.

1.7.3 Fokus Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih laki-laki dalam pemilihan kepala daera di kabupaten Merauke.

¹⁴ Feny Rita Fiantika, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal.3-4.

1.7.4 Sumber Data

Data hasil penelitian yang dapat dalam pembuatan kebijakan, bila dilihat dari sumbernya dapat dibagi menjadi data hasil penelitian lapangan dan data dokumentasi. Data dokumentasi bisa berupa data hasil penelitian yang telah lalu dilakukan peneliti sendiri atau orang lain. Data langsung dari lapangan sering disebut data primer, dan data dokumentasi disebut data sekunder. Bila dilihat dari oemilikan data, data hasil penelitian lapangan maupun dokumentasi dapat di bagi menjadi data internal dan data eksternal. Data internal adalah data hasil penelitian yang berasal dari lembaganya sendiri dan data eksternal adalah data hasil penelitian yang berasal dari luar lembaganya sendiri. Data internal maupun eksternal bila dilihat dari segi waktunya dapat berupa data yang berbentuk *time series*, *cross sectional* dan gabungan.

Data yang berbentuk *time series* adalah data yang dikumpulkan beberapa kai dalam interval waktu yang relatif sama, menggunakan instrument yang sama dan objek yang sama. Pada penelitian eksperimen yang menggunakan desain *time series* akan menghasilkan data yang berbentuk *time series*. Data *cross sectional* adalah data yang dikumpulkan dari objek yang sama atau berbeda dengan isntrumen yang sama atau berbeda dalam interval waktu yang tidak sama. Data gabungan adalah gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross sectional*.

Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, data kualitatif empiris dan data kulitatif bermakna. Data kualitatif empiris adalah data sebagaimana danya (tidak diberi makna). Sedangkan, data kualitatif bermakna

adalah data dibalik fakta yang tampak. Penelitian kualitatif yang lebih mendalam banyak berkaitan dengan data kualitatif yang bermakna, oleh karena itu peneliti kualitatif harus mampu memberi makna atau memberi interpretasi terhadap fakta-fakta yang diperoleh di lapangan secara empiris.¹⁵

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan adalah teknik penentuan informan sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan hal hal tertentu dalam pengambilan sampelnya. Sedangkan snowball sampling adalah dari jumlah informan yang sedikit kemudian lama lama berkembang menjadi banyak dikarenakan kebutuhan informasi yang lebih spesifik serta lebih banyak. Mungkin dalam proses penelitiannya, penulis memerlukan informasi yang lebih dalam penelitiannya. Misalnya, seseorang yang dianggap sebagai informan kunci ternyata tidak memberikan informasi yang seperti penulis harapkan, untuk itu penulis perlu informan lain untuk mendapatkan informasi yang ditargetkan.¹⁶

Menurut Sugiyono kedua teknik penentuan informan ini termasuk kedalam kategori nonprobability sampling, dalam bukunya dituliskan bahwa “nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Maret 2023 (Bandung;Alfabeta, 2023), hal. 8-9

¹⁶ Muhammad Idrus, Metode., hal. 96-97

memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel.”¹⁷

Mencermati begitu luasnya cakupan tentang Partisipasi Pemilih Laki-Laki Di Papua Dalam Pemilihan Kepala Daerah yang akan dikomparasikan, maka penelitian ini penulis memilih beberapa informan berdasarkan kriteria diantaranya:

1. Partai Politik yang memiliki peran utama dalam memeberikan ruang dan tempat bagi para laki-laki di papua untuk masuk dan terjun dalam dunia politik terutama pada pemilihan kepala daerah.
2. Masyarakat di Papua khususnya Kabupaten Merauke. Hal ini dikarenakan pentingnya pandangan masyarakat selain staff pemerintah untuk berpendapat dalam mengkomparasikan partisipasi politik bagi laki-laki, serta hal ini sangat potensial akan menambah informasi yang penulis dapatkan.
3. Komisi Pemilihan Umum sebagai instansi penyelenggara serta instansi yang memiliki sumber data utama mengenai pemilih dalam pemilihan umum di Kabupaten Merauke.

Kriteria informan diatas diharapkan penulis mendapatkan informan yang tepat dalam penelitian ini serta dapat menjadikan unit analisis semakin kecil dan lebih fokus.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke 22 (Bandung:Alfabeta, 2015), hal. 218.

Teknik pengumpulan/pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentative karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data yang mau diperoleh.

Menurut Denzin dan Lincoln: *the qualitative research as bricoleur uses the tools of historical or methodological trade, deploying whatever strategies, methods, or empirical materials as are at hand*. Dengan kata lain, penelitian kualitatif itu merupakan: *a kind of professional do it yourself person*, yang mengimplikasikan keputusan-keputusan profesional penelitian sesuai dengan konteks permasalahan fakta sasaran penelitian, dan target hasil yang ingin dicapai.¹⁸

Berbagai teknik pengumpulan data itu sebenarnya hanya merupakan “*methodological trade*” yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kepentingan si peneliti. Beberapa teknik pengumpulan data itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Teknik Observasi

Observasi merupakan suatu upaya: merumuskan masalah, membandingkan masalah (yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan (guna menemukan pertanyaan) yang akan dituangkan dalam kuesioner, ataupun untuk menemukan strategi pengambilan data dan bentuk perolehan pemahaman yang dianggap paling tepat.¹⁹

¹⁸ Nursapiah, Penelitian Kualitatif (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 76

¹⁹ Ibid, hlm. 77

Untuk keperluan obeservasi peneliti dapat melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan itu antara lain dalam bentuk:

- a. Membuat daftar pertanyaan sesuai dengan gambaran informasi yang ingin diperoleh.
- b. Menentukan sasaran obeservasi dan kemungkinan waktu yang diperlukan untuk melakukan obeservasi pada sasaran tersebut secara lentur.
- c. Melakukan antisipasi berkenaan dengan sasaran pokok dan sasaran sampingan, serta pertalian antara sasaran yang satu dan yang lain sebagai suatu kesatuan.

Peneliti dapat melakukan kegiatan obeservasi secara individual ataupun dapat melakukannya secara kelompok. Dalam pelaksanaannya peneliti bisa melakukannya secara terselubung, secara eksplisit, atau menggabungkan penggunaan teknik observasi ini dengan teknik lain. Misalnya menggabungkan antara wawancara dan catatan lapangan secara analitik. Dalam kegiatan obeservasi terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh peneliti.

- a. Peneliti hanya akan mencatat apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan, dan tidak memasukkan sikap dan pendapat pada catatan obeservasi yang dituliskannya. Dengan kata lain, catatan obeservasi hanya berisi deskripsi fakta tanpa opini.
- b. Tidak boleh mencatat sesuatu hanya merupakan perkiraan karena memang belum dilihat, didengar, atau dirasakan secara langsung.
- c. Diusahakan agar catatan obeservasi menampilkan deskripsi fakta sejarah holistic, sehingga konteks fakta yang dicatat dipahami.

d. Ketika melakukan obeservasi jangan melupakan target karena bisa sewaktu melakukan obeservasi peneliti menemukan fakta lain yang menarik, tetapi tidak menjadi bagian penelitiannya.

Hasil kegiatan obeservasi bisa berupa catatan atau rekaman atas suatu peristiwa. Dalam melakukan obeservasi peneliti mesti menjaga jarak, guna menghindari dia sebagai bentuk kesalahan secara sistematis yang bisa mempengaruhi pemaknaan yang dilakukannya. Pada sisi lain, peneliti bisa juga terkocek oleh perampatan hasil persepsi akibat penyamarataan terhadap suatu fakta yang secara permukaan kelihatannya sama, tetapi sebenarnya berbeda.²⁰

B. Teknik Interview (wawancara)

Interview/wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak terstruktur. Wawancara yang terstruktur merupakan bentuk interview yang sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan secara ketat. Wawancara semi terstruktur, meskipun wawancara sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya. Wawancara secara tak terstruktur (terbuka) merupakan wawancara di mana peneliti hanya terfokus pada pusat-pusat permasalahan tampak diikat format format tertentu secara ketat. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penggunaan teknik wawancara adalah sebagai berikut.

²⁰ Ibid, hlm. 78-79

(a) Menuliskan butir-butir pertanyaannya akan dicari jawabannya, mungkin secara detil atau secara garis besar sesuai dengan bentuk wawancara yang akan dilakukannya.

(b) Memikirkan ulang atau membahasnya bersama teman berkenaan dengan putri pertanyaan yang dipersiapkan.

(c) Menentukan tema interview dan antisipasi kemungkinan informasi yang ingin atau dapat diperoleh.

(d) Memahami dengan benar partisipan dalam kegiatan wawancara, sehingga dapat dijadikan pemandu dalam membuat penafsiran maupun kesimpulan berkenaan dengan informasi yang diberikan.

(e) Tidak menyalahkan pertanyaan pada pemberian jawaban (setuju atau tidak setuju) secara sugestif.

(f) Jangan membiarkan partisipan memberikan jawaban secara panjang lebar yang melampaui batas informasi ataupun topik permasalahan yang seharusnya dibicarakan.

(g) Tidak menginterupsi jawaban dengan pertanyaan yang berbau penafsiran, penggalan pendapat secara subjektif ataupun klarifikasi atas suatu kesimpulan yang memancing munculnya opini.

(h) Menjaga sequence pembicaraan sesuai dengan urutan permasalahan atau konsekuensi informasi yang ingin diperoleh.

(i) Melaksanakan wawancara dengan memanfaatkan bahan rekaman, menciptakan suasana yang segar, menjauhkan suasana pembicaraan dari suasana emosional, sehingga mempengaruhi karakteristik informasi yang seharusnya disampaikan.²¹

C. Teknik Penelaahan Catatan Lapangan & Memo Analitik

Catatan lapangan dan memo analitik merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan melalui obeservasi yang digabungkan dengan interaksi dalam bentuk dialog secara partisipatoris. Dengan cara ini peneliti diharapkan bisa memperoleh sejumlah fakta dan informasi atas sebuah fokus permasalahan yang diperoleh dari berbagai dimensi. Peneliti perlu mencatat tanggal, tempat terjadinya peristiwa/munculnya fakta, dan fokus penelitiannya berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan peneliti melakukan pencatatan. Apa yang dicatat bukan hanya terkait dengan fakta yang dilihat tetapi juga dengan fakta yang diperoleh dari hasil interaksi ataupun wawancara.²²

D. Teknik Elisitasi Dokumen

Penelitian kualitatif bukan hanya merujuk kepada faktor sosial sebagaimana terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi bisa juga merujuk bahan berupa dokumen. Berbagai dokumen itu seperti teks (berupa bacaan, rupa rekaman audio, maupun berupa audio visual). Hal ini biasa dijumpai ketika melakukan penelitian terhadap naskah, karya sastra, dan seni pertunjukan.²³

²¹ Ibid, hlm. 81-83

²² Ibid, hlm. 83

²³ Ibid, hlm. 85

E. Partisipasi Dalam Kaji tindak

Berbeda dengan data yang diambil melalui sejumlah teknik di atas, yang bisa jadi mengacu pada data natural, pengambilan data melalui teknik partisipasi kaji tindak mengacu pada pengambilan data atas hasil intervensi peneliti sebagai praktisi yang telah dipersiapkan peneliti.

Sebelum melakukan pengambilan data peneliti terlebih dahulu Menyusun konsepsi yang dijadikan landasan. Landasan itu sejalan dengan bentuk Tindakan yang akan dilakukan dalam program aksi. Pengumpulan data bisa diambil melalui kegiatan obeservasi, interview, dokumen, maupun hasil kegiatan. Sebagai data yang terkait dengan kaji tindak, tata tersebut pada dasarnya bersifat akumulatif. Jadi akumulasi data tersebut peneliti diharapkan bisa mendapatkan informasi tentang kondisi awal, permasalahan yang muncul, proses tindakan yang dilakukan, keterlibatan kelompok sasaran dalam aktivitas tindakan, hasil tindakan, dan data berkenaan dengan kegiatan tindakan yang dilakukan. Dari serangkaian kegiatan aksi itu, diharapkan peneliti bisa mengetahui/ menunjukkan efek tindakan yang dilakukan.²⁴

Penulis memilih beberapa teknik pengumpulan data kualitatif untuk penelitian ini. Teknik pertama adalah teknik wawancara tatap muka (*face to face interview*). Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara ini merupakan jenis wawancara yang memberi peluang peniliti untuk mengembangkan pertanyaan pertanyaannya dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan.

²⁴ Ibid, hlm. 86-87

Teknik dokumentasi menjadi teknik pengumpulan data terakhir untuk mendukung dan memperkuat data yang didapatkan selama melakukan penelitian lapangan. Serta sebagai bukti dalam penelitian lapangan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan & Biklen dalam Ibrahim, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif, yaitu reduksi, display data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

Analisis data interaktif ini selalunya merujuk pada konsep yang ditawarkan oleh Miles dan Hubberman, yang terdiri dari kegiatan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusion) antara lain :²⁵

a. Reduksi data

Reduksi Data adalah proses di mana seorang peneliti perlu melakukan telaahan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Pada tahap ini peneliti coba menyusun data lapangan membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan

²⁵ *Op.Cit*, Ibrahim, hlm 108 - 111

kategorisasi yang sesuai dengan fokus dan aspek fokus. Dan proses inilah peneliti dapat memastikan mana data-data yang sesuai terkait dan tidak sesuai atau tidak terkait dengan penelitian yang dilakukan.

- b. **Display Data (Penyajian Data)** Display Data diartikan sebagai upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data. Sebagai sebuah langkah kerja analisis, display data dapat dimaknai sebagai upaya menampilkan, memaparkan dan menyajikan secara jelas data-data yang dihasilkan dalam bentuk gambar, grafik, bagan, tabel dan semacamnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegiatan display data dalam analisis kualitatif meliputi langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) yang satu dengan (kelompok) yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan yang utuh. Hal ini penting disadari mengingat karakter data kualitatif yang beragam perspektifnya dan terasa bertumpuk.
- c. **Penarikan kesimpulan atau verifikasi** Langkah analisis ini biasanya dilakukan sebagai implementasi prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada, dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Pada tahap ini, peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir penelitian. Karena itulah tahapan analisis ini dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian berdasarkan satuan kategorisasi (aspek fokus) maupun pertanyaan utama penelitian (fokus).

Artinya bahwa, proses analisis penelitian dianggap selesai (final) ketika seluruh data yang telah dihasilkan dan disusun telah dapat memberikan jawaban yang baik dan jelas mengenai permasalahan penelitian (fokus).

1.7.8 Keabsahan Data/Triangulasi

Untuk mendapatkan keabsahan data maka penulis menggunakan beberapa teknik pengujian validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif, diantaranya :

1. Triangulasi data yang diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Lebih lanjut tentang triangulasi data ada 3 jenis yaitu:²⁶
 - a. Triangulasi sumber dengan menggunakan sumber teori yang berbeda dan dari banyak sumber.
 - b. Triangulasi teknik, dengan menggunakan lebih dari satu teknik/ganda.
 - c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan bertahap dan dalam kurun waktu yang cukup lama.
2. Pengamatan terus menerus dengan melakukan observasi lebih tekun.
3. Membicarakannya dengan orang lain, atau mendiskusikannya dengan orang yang diperkirakan kompeten untuk berdiskusi tentang subjek yang diteliti.²⁷

²⁶ Sugiyono, Metode., hal. 274

²⁷ Muhammad Idrus, Metode., hal. 145-146

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1.1 Gambaran Umum Provinsi Papua Selatan Dan Kabupaten Merauke

2.1.1 Perspektif Sejarah Provinsi Papua Selatan

Provinsi Papua Selatan merupakan satu di antara provinsi di Indonesia yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua. Ibu kotanya berada di Kabupaten Merauke. Papua Selatan dimekarkan dari Provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang ditandatangani oleh presiden Indonesia (Joko Widodo) pada tanggal 25 Juli 2022.

Pemekaran provinsi Papua Selatan awalnya direncanakan akan terdiri atas lima kabupaten, yakni Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Merauke yang tergambar sebagai berikut:²⁷

²⁷Pemerintah Provinsi Papua Selatan, “Sejarah,” (<https://papaselatan.go.id/profil/sejarah>., diakses pada tanggal 6 Juni 2025)

No.	Nama Kabupaten	Ibu Kota	Bupati	Luas Wilayah (Km ²)	Jml. Penduduk	Jml. Distrik	Jml. Kelurahan /Kampung
1	Kabupaten Asmat	Agats	Elisa Kambu	26.142,93	111.632	19	-/221
2	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah	Hengky Yaluwo	22.812,77	64.716	20	-/112
3	Kabupaten Mappi	Kepi	Michael Rooney Gomar (Pj.)	24.016,97	109.579	15	2/162
4	Kabupaten Merauke	Merauke	Romanus Mbaraka	47.297,44	231.696	20	11/179

Sumber :Pemerintah Provinsi Papua Selatan

Papua Selatan berada di dataran rendah yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan banyak rawa-rawa dan sungai besar seperti Digul dan Maro. Wilayah ini memiliki hasil bumi seperti sagu dan ikan yang menghidupi suku-suku di tepian sungai dan pantai seperti Marind, Asmat, Kombay, Koroway, Muyu maupun suku-suku lainnya.

Suku-suku di Papua Selatan termasuk dalam wilayah adat Anim Ha. Mereka umumnya menggunakan perahu dayung dan membuat ukiran-ukiran kayu khususnya Asmat. Papua Selatan terdapat Taman Nasional Wasur yang memiliki kekayaan hayati yang tinggi seperti walabi, musamus atau rumah semut raksasa, dan cenderawasih.²⁸

Adapun jika dilihat dalam perspektif sejarah pada masa Kolonial Belanda Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa di wilayah Papua Selatan, daerah tersebut dihuni oleh suku - suku yang bertahan hidup dengan berburu, meramu, dan berkebun. Selanjutnya pada abad ke-19, bangsa Eropa mulai menjajah Pulau

²⁸*Ibid*

Papua. Mereka membelah wilayah tersebut dengan garis lurus yang menyebabkan bagian barat menjadi wilayah Nugini Belanda dan bagian timur menjadi wilayah Inggris.

Meskipun begitu, warga Marind yang dikenal sebagai pemburu kepala kerap melewati perbatasan tersebut sehingga pada tahun 1902, Pemerintah Belanda mendirikan pos militer di ujung timur Papua Selatan. Pos yang berada di sekitar Sungai Maro itu didirikan untuk memperkuat perbatasan dan memberantas tradisi berburu yang dilakukan oleh warga Marind. Di samping itu, Belanda juga menjadikannya sebagai tempat penyebaran agama Katolik yang ditujukan pula untuk menghentikan tradisi pemburuan kepala oleh warga Marind. Lambat laun, pos tersebut menjadi makin ramai karena letaknya yang berada di Sungai Maro, pemerintah Belanda pun menamai wilayah tersebut dengan nama Merauke sekaligus ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Nugini Selatan. Orang-orang Jawa kemudian mulai berdatangan untuk membuka lahan persawahan di sana.

Seiring dengan berjalannya waktu, Belanda mendapatkan informasi mengenai keberadaan sebuah sungai yang lebih besar, yaitu Sungai Digul. Berdasarkan informasi tersebut, pemerintah Belanda bergerak cepat melakukan ekspedisi ke sana. Bahkan, pada tahun 1920-an, muncul ide dari Belanda untuk memanfaatkan pedalaman Papua sebagai kamp tahanan yang mereka beri nama Tanah Merah. Dengan kata lain, wilayah Digul itu merupakan tempat para tokoh dan proklamator bangsa, seperti Sutan Sjahrir dan Moh. Hatta, dibuang oleh Belanda.

Pada tahun 1960-an, pada saat Belanda sudah meninggalkan wilayah-wilayah tersebut, Tanah Merah pun makin ramai dan pada akhirnya menjadi Kabupaten Boven Digoel. Sekitar tahun 1960-an itu pula, seluruh Nugini Belanda berhasil dikuasai Indonesia dan wilayah Nugini Selatan diubah menjadi Kabupaten Merauke. Pada tahun 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi empat kabupaten, yakni Kabupaten Merauke sebagai kabupaten induk, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Asmat. Pada tahun 2022, seluruh wilayah tersebut dipersatukan menjadi Provinsi Papua Selatan.

2.1.2 Gambaran Geografis

Provinsi Papua Selatan secara administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, secara geografis terletak pada garis koordinat $6^{\circ} 00' LU$ $9^{\circ} 00' LS$ dan $137^{\circ} 30' BT$ - $141^{\circ} 00' BT$ dengan luas 120.270,11 km².

Wilayah administrasi Provinsi Papua Selatan terdiri dari 4 kabupaten (Kabupaten Merauke, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi), yang terbagi menjadi 78 Distrik, 24 Kelurahan dan 686 Kampung. Ibu Kota Provinsi Papua Selatan berada di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor terletak di distrik Kurik sekitar 60 km dari kota Merauke. Topografi wilayah Provinsi Papua Selatan didominasi oleh dataran dengan ketinggian 0 – 55 mdpl Provinsi Papua Selatan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

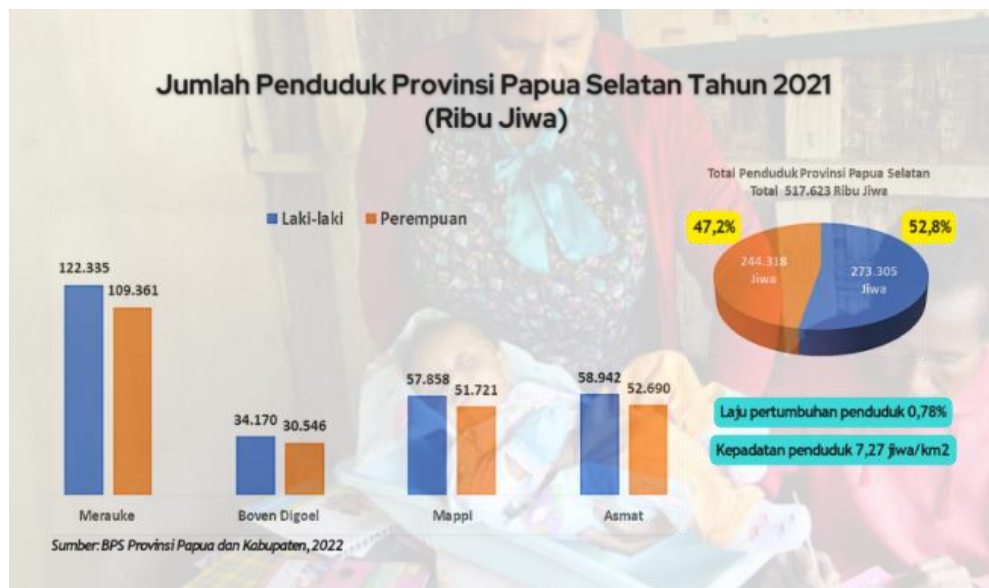
- Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten

Pegunungan Bintang.

- Timur: Berbatasan dengan Negara Papua Nugini.
- Selatan: Berbatasan dengan Laut Arafura.
- Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Aru.

2.1.3 Penduduk Papua Selatan

Bertambahnya penduduk maka secara langsung dapat mempengaruhi kepadatan penduduk per wilayah. Berdasarkan data penduduk yang dibandingkan luas wilayah, diketahui kepadatan penduduk Provinsi Papua Selatan pada tahun 2021 sebesar 7,27 jiwa/km². Kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi terdapat di Kabupaten Mappi yaitu 13,06 jiwa/km². Sedangkan untuk kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk terendah yaitu Kabupaten Merauke.



Sumber : Pemerintah Daerah Papua Selatan

2.1.4 Luas Wilayah

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terluas dan paling timur di Indonesia yang beribukota di Merauke dengan luas wilayah sebesar 45.071 km² yang sebagian besar merupakan daerah dataran. Kabupaten Merauke membawahi 24 distrik, 8 kelurahan dan 160 kampung dimana luas wilayah Kabupaten Merauke berdasarkan distrik disajikan pada gambar dibawah ini.



Sumber: Pemerintah Daerah Papua Selatan

2.2 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

2.2.1 Gambaran Organisasi

KPU terdiri atas, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, KPU membentuk Badan Ad Hoc yang bertugas membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kecamatan (disebut dengan PPK/Panitia Pemilihan Kecamatan), di tingkat Desa (disebut PPS/ Panitia Pemungutan Suara), dan di tingkat TPS / Tempat Pemungutan Suara (disebut KPPS/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Selain itu, untuk melaksanakan Pemilu di luar negeri, KPU juga

dibantu oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Dalam Penelitian ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke sebagai lembaga penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten yang bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke terbentuk pada bulan Maret tahun 2003 yang beralamatkan di Ermasu Merauke. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dibentuk untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pertama di Indonesia yaitu pada tahun 2005.

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang, KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali untuk satu kali jabatan berikutnya.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi dan dan KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota merupakan Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

2.2.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kota Merauke yaitu :

Tugas KPU Kabupaten Kota adalah:

²⁹ Website Resmi KPU Kabupaten Merauke (<https://kab-merauke.kpu.go.id/page/read/sejarah-komisi-pemilihan-umum>, diakses pada tanggal 28 April 2025).

- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;

- Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan KPU Kabupaten Kota adalah:

- Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya
- Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan bawaslu Provinsi, Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturang perundang-undanga

KPU Kabupaten / Kota Berkewajiban:

- Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan dengan segera putusan bawaslu Kabupaten/Kota

- Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan putusan DKPP; dan
- Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.³⁰

2.2.3 Struktur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Tabel 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Nama	Jabatan
Alfred Bertrand David Dodu	Sekretaris
Jakobus Bernadus Hendrikus Marselubun	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik
Oktavina Sattu Pasau	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
Agustina Y Modduw	Kasubag bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
Djumadiyadin	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

2.3 Bakal Calon Gubernur

Pada tahun 2024 kemarin provinsi Papua Selatan memiliki 4 bakal calon Gubernur dalam pemilihan kepala daerah perdana bagi provinsi Papua Selatan

³⁰ Website KPU Kabupaten Labuhan Batu, (<https://kab-labuhanbatuutara.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 28 april 2025.)

sebagai provinsi baru hasil dari pemekaran provinsi induk yaitu Provinsi Papua. Bakal calon Gubernur yang kemarin mengikuti panasnya ajang pemilihan di provinsi Papua Selatan ialah:

1. Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo



Pasangan Dariurs Gewlom dan Yusak Yaluwo diusung oleh empat partai politk diantaranya Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Perindo.

2. Nikolaus Kondomo dan Haji Baidin Kurita



Pasangan Nikolaus Kondomo dan Haji Baidin Kurita diusung oleh tiga partai politik diantaranya PKB, Partai Buruh, dan PBB.

3. Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak



Pasangan Romanus Mbaraka dan Albertus Muyak diusung oleh dua partai politik yaitu Nasdem dan PAN.

4. Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa



Pasangan Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa diusung oleh empat partai diantaranya PDIP, PKS, PSI, dan PPP.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Tingkat Partisipasi Pemilih Laki - Laki Di Papua

Selatan Rendah

Partisipasi merupakan individu - individu yang ikut terlibat dalam bermacam - macam tindakan di dalam kehidupan politik berupa kegiatan dalam memberi atau tidak dalam mendukung kegiatan politik seperti kegiatan kampanye dan pemberian suara dalam pemilu/pemilukada.³¹ Partisipasi juga melibatkan mental dan emosi dibandingkan dengan fisik seseorang, maka dari itu pribadi seseorang diharapkan lebih banyak terlibat dibandingkan dengan fisiknya sendiri.³² Seperti partisipasi di politik merupakan kegiatan yang terlibat pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negaranya . Partisipasi politik ini juga memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum.³³

Bertolak terhadap penelitian penulis dalam hal ini terkait dengan partisipasi politik di Provinsi Pada umumnya bukanlah hal yang baru bagi masyarakat disana. Dikarenakan semenjak bergabungnya Papua dengan Indonesia sendiri, dilakukan pemungutan pendapat rakyat atau dikenal dengan istilah pepera yang diadakan pada tanggal 2 Agustus 1969. Dengan adanya peristiwa ini

³¹ Amin, M, *Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik*. Jurist-Diction, 2019 2(3), 965

³² Novita, D & Fitri. A, *Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019*. Jurnal Kajian Komunikasi, 2020, Bahasa Dan Budaya, 7(2), 56-84

³³ Lestari, E. Y., & Arumsari, N, *Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang*. 2018, Integralistik, 1, 63-72

menandakan bahwa masyarakat Papua sejatinya sudah melakukan partisipasi politik mereka pada permasalahan politik yang terjadi di masa itu.

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan otonomi khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Provinsi Papua sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.435.430 Jiwa pada Tahun 2020. Dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir Provinsi Papua telah melaksanakan pemilihan kepala daerah baik itu pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Tahun 2018 maupun pemilihan bupati 3 dan wakil bupati yang dilakukan secara serentak pada Tahun 2015, serta pada tahun 2024 baru – baru ini yang telah dilaksanakan.

Pentingnya suatu partisipasi politik kepada masyarakat pemilih baik itu pemilih perempuan maupun pemilih laki – laki tidak lain adalah kesemuanya memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bersifat demokrasi dalam menggunakan sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pada pengambilan keputusan daerah. Makin tinggi tingkat partisipasi politik yang dilakukan dapat diindikasikan pula bahwa rakyat akan lebih memahami bahkan melibatkan diri dalam kegiatan demokrasi.³⁴ Namun, jika tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya ditemukan rakyat yang sangat kurang berpartisipasi dan tidak peduli terhadap masalah kegiatan demokrasi seperti sikap golongan putih (golput) dalam pemilu/pemilukada.³⁵

³⁴Sakinah, artikel Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Sebagai Implementasi Demokrasi. <https://osf.io/preprints/hra7t/%0Ahttps://osf.io/hra7t/download>, diakses pada tanggal 30 April 2025.

³⁵ Yuliati, Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 2017, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.840>

Rendah atau tingginya tingkat partisipasi politik yang dilakukan merupakan indikator penting terhadap jalannya suatu proses demokrasi. Maka dari itu tingkat partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan kepada seluruh masyarakat papua selatan khususnya kabupaten Merauke dengan tidak membedakan – bedakan gender, hal tersebut merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi serta perwujudan dari kedaulatan rakyat.³⁶

Terdapat beberapa dimensi yang mempengaruhi partisipasi politik laki – laki rendah di Kabupaten Merauke yaitu sebagai berikut:

(1) Kurangnya Aspek kesadaran politik

Kesadaran politik dalam hal ini adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dan lain sebagainya. Kurangnya kesadaran politik terhadap laki – laki di kabupaten papua dalam memilih tidak terlepas dari sikap apatis yang muncul karena ketidakpercayaan terhadap calon kepala daerah atau partai politik yang bertarung. Kaum laki – laki di kabupaten Merauke lebih memilih untuk bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – sehari dibandingkan memilih pasangan calon yang justru akan menghabiskan waktu dan tidak memperoleh apapun pada saat hari pencoblosan tersebut. Sementara itu beberapa masyarakat khususnya kaum laki – laki di wilayah tersebut merasa bahwa

³⁶ Wardhani, P. S. N, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2018, 10(1), 57–62.

hasil pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi mereka.

(2) *Lobbying* atau kurangnya sosialisasi

Lobbying merupakan suatu aspek yang biasa dilakukan oleh partai politik dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah untuk memberikan pemahaman serta pengertian akan hak dan kewajiban dalam memberikan suara mereka dalam pemilihan Kepala Daerah untuk menentukan pejabat yang akan memimpin mereka selama masa jabatan nya. Sementara itu, Sosialisasi memiliki keterkaitan erat dengan komunikasi politik, karena merupakan bentuk interaksi langsung antara elit dan masyarakat. Secara keseluruhan, berbagai keputusan bersyarat yang ditetapkan untuk mencapai tujuan politik di masa depan, memperkuat kelembagaan politik, membangun rasa kebersamaan, serta menciptakan konsensus dikenal sebagai strategi komunikasi politik. Pengambilan keputusan yang tepat dalam komunikasi politik merupakan bagian dari langkah strategis yang harus dilakukan. Oleh karena itu, untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan strategi, taktik, serta perencanaan yang matang. Namun dalam hal ini kaum laki – laki di kabupaten Merauke seringkali lebih fokus pada kehidupan sehari-hari dan tradisi yang sudah mengakar, sehingga kegiatan politik yang termasuk Pilkada, tidak menjadi prioritas utama. Hal ini mengakibatkan banyak warga khususnya kaum laki - laki yang tidak tertarik atau merasa tidak penting untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan.

(3) Kurangnya akses informasi dan fasilitasi yang mendukung.

Dalam pemilu di wilayah kabupaten Merauke memang disadari terdapat kekurangan dalam akses informasi dan fasilitasi yang mendukung partisipasi politik sering kali menjadi keterbatasan oleh pihak penyelenggara pemilihan yang di alami oleh PPS dan KPPS di tingkat bawah. Sementara itu, kurangnya penggunaan teknologi informasi seperti media sosial sehingga banyak masyarakat khususnya kaum laki – laki belum memiliki akses internet atau perangkat yang memadai untuk mendapatkan informasi terkait Pilkada. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk mengikuti perkembangan kampanye politik atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai calon pemimpin yang ada. Dalam keterbatasan infrastruktur lain, seperti jarak yang jauh antara desa dan minimnya aksesibilitas, menjadi salah satu hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di daerah pedesaan. Faktor usia yang lanjut serta keterbatasan fisik pada sebagian pemilih, seperti disabilitas atau kondisi kesehatan yang kurang mendukung, turut memperburuk situasi ini. Pada kawasan pedesaan sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai tempat pemungutan suara (TPS) yang terletak cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Kondisi ini membuat sejumlah warga kesulitan untuk melakukan perjalanan ke TPS yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam pemilihan. penting bagi penyelenggara pemilu untuk memperhatikan perbaikan infrastruktur transportasi dan fasilitas umum lainnya, agar seluruh lapisan masyarakat, terutama yang memiliki keterbatasan mobilitas, dapat dengan mudah berpartisipasi dalam proses demokrasi.

3.1.1 Kegiatan Pemilihan

Tidak hanya mendukung dalam bentuk suara, namun kegiatan pemilihan ini memiliki macam jenisnya yaitu, memberi dukungan dengan cara berkampanye, mencari dukungan dari seseorang, dan berbagai macam kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil dari pemilihan Kampanye pemilihan kepala daerah ini dilakukan oleh kandidat pilkada ataupun orang-orang kepercayaan kandidat untuk menawarkan visi, misi, program, atau citra dari kandidat pilkada. Tujuan dari kampanye yang terutama ialah untuk mempengaruhi opini dari para pemilih agar mendukung kandidat ataupun partai politik yang sedang berkampanye. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik Provinsi Papua Selatan menjelaskan bahwa:

“Sebagai partai politik kita harus melihat terlebih dahulu partai itu memberi dukungan pada kandidat mana. Selanjutnya, partai politik akan memberikan arahan agar masing-masing dari anggota partai bergerak turun lapangan sesuai dengan arahan dari partai untuk kandidat yang diusung oleh partai tersebut.”³⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, menjelaskan bahwa partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih dikarenakan cara kerja partai politik yang langsung bergerak turun kelapangan untuk menemui masyarakat umum. Tentu saja partai politik pasti memiliki anggota bahkan sampai ke daerah terpencil sekalipun. Pernyataan tersebut ditambahkan oleh saudara Elias Basik-basik sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, mengatakan bahwa:

³⁷ Wawancara bersama Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik Provinsi Papua Selatan, pada Senin, 26 Mei 2025, pukul 17.00 WIB

“Saya memilih calon pemimpin berdasarkan ikatan keluarga yang terjalin. Apabila tidak ada keluarga yang mencalonkan maka saya akan memberikan dukungan saya pada pasangan calon yang memiliki kesamaan secara suku dengan saya.”³⁸

Kemudian dari Bapak Ismail Rumbewas masyarakat Kabupaten Merauke mengatakan bahwa:

“Saya sekarang melihat bahwa kegiatan pemilihan hanya menjadi suatu formalitas yang dilakukan dikarenakan pada kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan pada umumnya. Dikarenakan sekarang mau mengetahui ataupun tidak dari latar belakang calon tersebut tetapi tetap saja hasil yang diberikan bagi kami sedikit.”³⁹

Selanjutnya dari Ibu Helda Ambay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, mengatakan:

“Dalam kegiatan pemilihan ini kami sebagai KPU hanya menjadi tempat penyelenggaranya saja jadi perihal berkampanye bukanlah urusan kami sebagai KPU itu merupakan urusan calon kandidat dan partai politik.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut beberapa masyarakat Provinsi Papua Selatan yang telah diwawancarai, mereka memilih dengan mementingkan adanya suatu ikatan antara pemilih dengan calon yang diusung dikarenakan sudah tidak adanya rasa percaya akan calon-calon kandidat yang diusung hal tersebut disebabkan oleh janji palsu yang diberikan dari pemilihan-pemilihan sebelumnya kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Partisipasi pemilih laki-laki akan meningkatkan apabila ada sosialisasi politik yang baik dari penyelenggara pemilihan kepala daerah agar menarik perhatian masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan kepala daerah.

³⁸ Wawancara bersama Elias Basik-basik sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa 27 Mei 2025, pukul 14.00 WIB

³⁹ Wawancara bersama Bapak Ismail Rumbewas sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 15. WIB

3.1.2 *Lobbying*

Dalam pemilihan diperlukan *lobbying* yang menurut kamus Webster, memiliki arti melaksanakan suatu kegiatan dengan tujuan untuk mempengaruhi pegawai terlebih khusus mempengaruhi anggota legislative dalam pembuatan peraturan. Namun, secara Kamus Besar Bahasa Indonesia *lobbying* atau melobi memiliki arti suatu upaya pendekatan yang dilakukan secara tidak resmi, sedangkan secara partisipasi politik disebut dengan pelobian yang mencakup usaha individu maupun partai politik untuk mendapatkan hubungan antara para pejabat pemerintah atau pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan atau masalah yang dapat memberikan keuntungan bagi sejumlah orang.⁴⁰ Menurut Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik;

“Dalam partai politik *lobbying* merupakan cara partai politik mencari kandidat yang memiliki visi dan misi yang sama dengan partai politik. Maka dari itu, *lobbying* untuk mencari dan memberikan dukungan bagi kandidat dari partai yang akan diusung biasanya dilakukan dari jauh-jauh hari sebelum menetapkan kandidat yang akan diusung dari suatu partai politik. Ini dikarenakan, partai politik tentu saja memiliki kepentingan sendiri maka dari itu diperlukannya kandidat yang memiliki kesamaan dalam visi maupun misi dengan partai politik.”⁴¹

Berdasarkan pemaparan tersebut, menjelaskan bahwa *lobbying* menjelang suatu pemilihan kepala daerah partai politik akan melibatkan suatu kolaborasi antara beberapa kelompok maupun individu yang memiliki kepentingan yang sama dengan tujuan untuk memengaruhi proses pemilihan kepala daerah. *Lobbying*, biasa dilakukan terhadap pejabat pemerintah, pimpinan politik dan

⁴⁰ Rusly Nasution, Kemampuan Lobi dan Negosiasi Menjadi Suatu Keharusan Global. Jurnal Educare, 2002, Vol. 5, No.1, Hal. 86

⁴¹ Wawancara bersama Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik Provinsi Papua Selatan, pada Senin, 26 Mei 2025, pukul 17.00 WIB

toko-tokoh yang memiliki suatu kekuasaan atau pengaruh kuat pada daerah tersebut. Dalam dunia perpolitikan terutama dalam partai politik *lobbying* dilakukan untuk memenuhi berbagai macam kepentingan yang bisa tersalurkan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, ditambahkan oleh Ibu Helda Ambay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan mengatakan bahwa:

“Dalam proses *lobbying* biasanya dilakukan oleh para partai politik dan kandidat calon yang akan mengikuti pencalonan kepala daerah yang diselenggarakan. Komisi Pemilihan Umum hanya menjadi wadah penyelenggara pemilihan tersebut. Kami melaksanakan *lobbying* ke tingkat yang lebih tinggi seperti Bawaslu ataupun KPU RI dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini.”⁴²

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses *lobbying* pada pemilihan kepala daerah biasa dilakukan oleh partai politik. Setelah proses *lobbying* dilakukan antara partai politik dengan seorang kandidat calon yang akan diusung maka dari situlah partai politik akan bergerak untuk mencari masa yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan antara partai politik maupun kandidat yang akan diusung. Namun, proses *lobbying* yang dilakukan oleh KPU lebih menitik beratkan pada bagian penyelenggaraannya saja. KPU tetap melaksanakan tupoksi nya sebagai penyelenggara dengan melaksanakan sosialisasi tapi tidak akan menginterfensi sampai ke proses yang lebih dalam lagi. Dikarenakan, KPU harus menjadi lembaga penyelenggara yang sifatnya netral tidak berpihak kepada siapapun. Jadi KPU dan Partai Politik memang sama-sama melaksanakan proses *lobbying* namun proses yang dilakukan dilaksanakan dan ditujukan ke pihak-

⁴² Wawancara bersama Ibu Helda Ambay sebaga Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 2025, pukul 19.00 WIB

pihak yang berbeda, sama-sama memiliki kepentingan namun beda tujuan. Partai politik melaksanakan lobbying dapat dikatakan untuk memenuhi kepentingan partai sedangkan kami KPU melaksanakan lobbying untuk mengakomodir penyelenggaraan pemilihan.

3.1.3 Kegiatan Organisasi

Kegiatan organisasi merupakan partisipasi seorang anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi tersebut kemudian dapat memberikan perhatiannya kepada suatu kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarah kepada persoalan-persoalan umum yang lebih beraneka raga. Menurut Elias Basik-Basik sebagai masyarakat Kabupaten Merauke, mengatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa terlibat maupun tidaknya kita ke dalam suatu organisasi pada akhirnya kita akan tetap memilih seorang pemimpin yang tidak hanya memberikan janji palsu terhadap kita. Saya mengikuti beberapa organisasi untuk pengembangan diri saya. Namun, yang saya rasakan sama saja padahal tujuan utama saya mengikuti suatu organisasi ialah untuk mengembangkan diri saya tapi makin ke sini organisasi yang ada lebih banyak memiliki kepentingan pribadi dan hanya fokus ke orang-orang yang memang memiliki popularitas saja. Jadi, buat kita yang tidak memiliki hal tersebut hanya akan tersembunyi dalam organisasi tersebut.”⁴³

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak Ismail Rumbewas sebagai masyarakat Kabupaten Merauke, mengatakan bahwa:

“Apabila suatu organisasi betul-betul menjalankan perannya secara sempurna maka partisipan yang terlibat didalamnya akan semakin banyak dan dari berbagai macam kalangan. Dikarenakan, anak jaman sekarang mengikuti suatu kegiatan organisasi yang sebatas formalitas dari kampus

⁴³ Wawancara bersama Elias Basik-basik sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa 27 Mei 2025, pukul 14.00 WIB

saja tidak betul-betul mendalami arti dan makna dari kegiatan organisasi yang sesungguhnya. Serta, kebanyakan dari kegiatan organisasi yang ada di Kabupaten Merauke ini sekarang lebih banyak mengutamakan kepentingan masing-masing sudah tidak lagi melihat kepentingan secara umum yang dibutuhkan dari partisipan yang terlibat dalam organisasi tersebut.”⁴⁴

Terakhir Ibu Helda Ambay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, mengatakan bahwa:

“Komisi Pemilihan Umum sangat mendukung setiap kegiatan organisasi yang terjadi pada Kabupaten Merauke. Hal ini dikarenakan, akan mempermudah kami sebagai anggota KPU dalam menjalankan tugas kami untuk mengsosialisasikan pemahaman tentang pemilihan kepala daerah karna sudah pasti anggota yang terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut sudah pasti masyarakat dengan usia yang sudah memiliki hak suara untuk memilih. Saya rasa apabila kegiatan organisasi ini bisa terjadi atau bahkan terjalin sampai ke pelosok-pelosok daerah maka tidak akan sulit lagi bagi kami KPU untuk memberikan sosialisasi dan itu juga akan berdampak pada hasil pemilihan yang terjadi dikarenakan masyarakat sudah dengan lebih jelas memahami tentang pemilihan.”⁴⁵

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan organisasi merupakan hal pertama yang perlu dilakukan pada setiap daerah yang ada. Namun, harus tetap melihat persoalan dengan umum yang sangat banyak ragamnya jangan hanya melihat dari salah satu persoalan untuk kepentingan khusus saja. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat akan kegiatan organisasi tersebut lagi kedepannya.

3.1.4 Mencari Koneksi

Pencarian koneksi merupakan tindakan perorangan yang biasa ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dilakukan dengan tujuan

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Ismail Rumbewas sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 15.WIB

⁴⁵ Wawancara bersama Ibu Helda Ambay sebaga Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 2025, pukul 19.00 WIB

memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segilintir orang. Menurut Helda Ambay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, mengatakan bahwa:

“Mencari koneksi yang dilakukan oleh KPU sendiri lebih kepada sistem penyelenggaraannya saja. KPU harus memiliki koneksi sampai ke pelosok daerah untuk melihat apakah sosialisasi yang selama ini dilakukan betul-betul tersampaikan sampai kepada masyarakat yang berada di pelosok daerah.”⁴⁶

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Ismail Rumbewas sebagai masyarakat Kabupaten Merauke, mengatakan bahwa:

“Saya rasa partai politik masih kurang dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari koneksi ke daerah-daerah. Itu semua terjadi karena sekarang partai politik sudah mulai susah untuk mendapatkan partisipasi dan rasa percaya dari masyarakat Kabupaten Merauke itu sendiri.”⁴⁷

Selanjutnya menurut saudara Elias Basik-Basik sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, mengatakan bahwa:

“Saya rasa sampai sekarang dalam mencari koneksi para elit politik yang melakukan pencarian koneksi tersebut masih ragu dengan kami para anak-anak muda karena selalu masuk ke orang-orang yang usianya lebih tua. Padahal. Tanpa mereka sadari anak-anak muda seperti kami ini yang sebenarnya diperlukan dalam pemilihan.”⁴⁸

Terakhirnya Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik, mengatakan bahwa:

“Partisipasi pemilih itu mereka yang pertama akan melihat dari figur kemudian sekarang sudah mulai muncul rasa apatisisme dalam masyarakat. Kembali kepada masyarakat dalam melihat figure apabila sesuai maka mereka akan melaksanakan pencoblosan.”⁴⁹

⁴⁶ Wawancara bersama Ibu Helda Ambay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 2025, pukul 19.00 WIB

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Ismail Rumbewas sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 15.WIB

⁴⁸ Wawancara bersama Elias Basik-basik sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa 27 Mei 2025, pukul 14.00 WIB

⁴⁹ Wawancara bersama Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik Provinsi Papua Selatan, pada Senin, 26 Mei 2025, pukul 17.00 WIB

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi dua hal yang berbeda dalam mencari koneksi pada Kabupaten Merauke. Pertama, partai politik yang masih kurang menjangkau segala lini masyarakat yang ada pada Kabupaten Merauke. Kedua, masyarakat yang sudah mulaimasuk pada fase tidak percaya akan adanya pemiihan dan mulai mengarah kepada apatisme. Apabila hal itu telah terjadi maka akan sulit bagi para elit politik untuk mencari koneksi karena sudah muncul rasa tidak peduli lagi dari masyarakat itu sendir.

3.1.5 Tindakan Kekerasan

Satu bentuk partisipasi politik yang dihadirkan untuk keperluan analisis untuk dimasukan kedalam satu kategori khusus dengan arti untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Menurut Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik, mengatakan bahwa:

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwa Kabupaten Merauke ini memilih atas dasar kesukuan jadi apabila calon dari suatu daerah tidak dipilih pada daerahnya tentu saja akan terjadi suatu tindak kekerasan. Jadi saya rasa di Kabupaten Merauke ini bukan jadi manfaat tapi malah ancaman karena bisa berujung fatal.⁵⁰

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Helda Ambay sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum, mengatakan bahwa:

Sebenarnya kalo kekerasan yang terjadi di lapangan itu bisa berimbas pada kita KPU juga. Padahal KPU sebagai wadah penyelenggara tidak mengetahui apa-apa bisa terkena dampak nya juga dari masyarakat.⁵¹

⁵⁰ Wawancara bersama Bapak Robert Sumaghai sebagai Anggota Partai Politik Provinsi Papua Selatan, pada Senin, 26 Mei 2025, pukul 17.00 WIB

⁵¹ Wawancara bersama Ibu Helda Ambay sebaga Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, pada Rabu 28 Mei 2025, pukul 19.00 WIB

Selanjutnya ditambahkan oleh saudara Elias Basik-Basik sebagai masyarakat Kabupaten Merauke, mengatakan bahwa:

Saya rasa dalam setiap pemilihan terutama di Kabupaten Merauke hal-hal kecurangan itu paling ditakuti. Jadi saya selalu melihat-lihat terlebih dahulu harus masuk mendukung mana, karena kalo salah-salah bisa selesai sudah ceritanya.⁵²

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Merauke lebih sering terjadi dalam proses pemilihannya. Itu dikarenakan sifat primodialisme yang ada pada masyarakat Kabupaten Merauke yang membuat tindak kekerasan akan memiliki kemungkinan terjadi yang lebih besar. Dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan ini bukan memberikan suatu manfaat bagi Kabupaten Merauke malah justru sebaliknya hanya memberikan ancaman saja bagi masyarakat.

⁵² Wawancara bersama Elias Basik-basik sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Selasa 27 Mei 2025, pukul 14.00 WIB

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya suatu partisipasi politik kepada masyarakat pemilih baik itu pemilih perempuan maupun pemilih laki – laki tidak lain adalah kesemuanya memiliki hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bersifat demokrasi dalam menggunakan sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pada pengambilan keputusan daerah. Bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi politik masyarakat khusus nya pemilih laki – laki rendah salah satunya yaitu kurangnya kesadaran politik terhadap pemilih laki – laki hal ini dikarenakan kaum laki – laki di kabupaten Merauke lebih memilih untuk bekerja dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – sehari dibandingkan memilih pasangan calon yang justru akan menghabiskan waktu dan tidak memperoleh apapun pada saat hari pencoblosan tersebut. Sementara itu beberapa masyarakat khususnya pemilih laki – laki di wilayah tersebut merasa bahwa hasil pemilu tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap kondisi sosial-ekonomi keluarga mereka.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Bahwa diperlukan langkah – langkah menyeluruh dan utuh terhadap stakeholder terkait guna meningkatkan kesadaran politik masyarakat khususnya pemilih laki – laki di kabupaten Merauke dengan cara memperkuat komitmen calon kepala daerah dalam merealisasikan janji serta visi dan misi saat kampanye, serta membuka peluang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Karena kegiatan politik akan menentukan seberapa besar dan seberapa banyak seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Kesadaran politik yang tinggi memungkinkan individu untuk memahami pentingnya partisipasi mereka dalam proses politik, baik dalam bentuk pemilihan umum maupun kegiatan politik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Budiarjo Miriam, 2008, *Dasari-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Feny Rita Fiantika, 2022., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ramalan Surbaktim, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Rahman H. 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, Jakarta Erlangga.
- Nursapiah, 2020, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing.
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Ke 22 Bandung; Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia
- Sugiyono, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan Maret 2023 Bandung; Alfabeta.

Salusu. J, 2015. Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non-Profit. Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, 1994, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

JURNAL:

Anifatul Kiftiyah, 2019, *“Peremuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia”*. Vol. 14 No. 1, 2.

A. Sakti R.S. Rakia, *“Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdatus”*. Jurnal Justisi Vol. 7, No. 1.

Amin, M, 2019, Tanggungjawab Pelaku yang Mengikutsertakan Anak dalam Kegiatan Kampanye Politik. Jurist-Diction, Vol 2, No. 3

Akbar Karunia R, 2025, menurunnya partisipasi pemilih pada pilkada kabupaten tulungagung di wilayah desa tiudan, jurnal dinamika, Vol 1 No 1

Cory Noviati, 2013, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi. Vol. 10 No. 2.

Riski Priandi dan Kholis Roisah, 2019, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Vol. 1 No. 1.

Ode Jamal dan Senalince Mara, "Politik Kewargaan Multikulturalisme (Studi Kasus Tentang Peran Majelis Rakyat Papua dalam Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat Adat Papua Era Otonomi Khusus", Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 2.

Novita, D & Fitri, A, 2019, Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi Dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu, Jurnal Kajian Komunikasi, 2020, Bahasa Dan Budaya, 7(2).

Wardhani, P. S. N, Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 2018, 10(1).

Yuliati, 2017, Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi. Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi 5(2).

Lestari, E. Y., & Arumsari, N, 2018, Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Walikota Semarang di Kota Semarang, Integralistik, 1 (5).

INTERNET:

Pemerintah Provinsi Papua Selatan, "*Sejarah Provinsi Papua Selatan*",
<https://papuaselatan.go.id/profil/sejarah>.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan, "*Kependudukan Papua Selatan*",
(<https://papuaselatan.go.id/profil/sejarah>

Cristian Jhonfri Tambunan, 2021, Artikel tentang Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Merauke.

Sakinah, artikel Partisipasi Masyarakat Dalam Politik Sebagai Implementasi Demokrasi. <https://osf.io/preprints/hra7t/%0Ahttps://osf.io/hra7t/download>, diakses pada tanggal 30 April 2025.

Onie Wakum (Pusat data Merauke) melalui website <https://portal.merauke.go.id/news/1992/sejarah-kabupaten-merauke.html>, diakses pada tanggal 15 mei 2025 pkl 13.35.

Website Resmi KPU Kabupaten Merauke <https://kab-merauke.kpu.go.id/page/read/sejarah-komisi-pemilihan-umum>, diakses pada tanggal 28 April 2025.

Website KPU Kabupaten Labuhan Batu <https://kab-labuhanbatuutara.kpu.go.id/page/read/tugas-dan-kewenangan-kpu-kabupatenkota>, diakses pada tanggal 28 april 2025.

Website Merauke go.id <https://portal.merauke.go.id/page/view/22/struktur-organisasi> , diakses pada tanggal 29 April 2025.



VACIA MAGISTA PUTRI FACHIRI

Jl. Pertambangan, Silva Lestari, Abepura Jayapura, Papua
082315369712
vaciafachiri@gmail.com

As a Political Science student, I'm looking for a great experience and want to improve myself. Always interest for learning new things. I believe that every single person in this world is living their life on the right time, they are not to fast neither to slow. Keep your heads up and smiled cause their time is not your time, just focused on your own time.

EDUCATION

2018-Present
Jambi University
(Political Science)

2015
Mardi Yuana Senior High School,
Cianjur
(Science Field)

2012
Christian Junior High School BPK
Penabur, Bandung

2006
Christian Elemantary School Kalam
Kudus, Jayapura

EXPERIENCE

2021 (Sept-Oct)
Staff OCC PON XX Papua (Royalindo Convention Internasional), Techincal Coordinator
Handling the communication device such as Radios and Boleros.
Assure every Radios and Baleros is ready to be used by all departments.
Fixing the Radio that having trouble with their accessories.

2021 (Oct-Nov)
Liaison OCC PEPARNAS XVI Papua (Quantum Convex Internasional), Athletes Parade Coordinator
In charge and responsible for all athletes.
Coordinating with the stage manager for the parade technical.
Ensure that the athletes are ready and complete before the parade.
Explain the technical runway of parade to the athletes.

2022 (16-20 May)
Liaison Officer Sector Minister Meeting SWA (Quantum Convex Indonesia and Polyglot Indonesia), ENGLISH SPEAKER
Receive the delegation at the airport.
Drop off the delegation at the airport.
To attend to the delegation during their stay in Swissotel Jakarta PIK Avenue.
Helping the delegation to communicate.
Inform all the information that is needed by the delegation.

2023 (26-29 March)
Youth Representative, Workshop On Women Human Rights in Bangkok, Thailand.

SKILL

- Communication
- Networking\
- Interpersonal
- Work under pressure
- Multitasking
- Following Instruction
- Collaborative and appreciating colleagues

ORGANIZATION

Student Executive Board, Faculty of Social and Political Science (2018-2019)

- **Religious Division**

Papua Jambi Student Association, (2019-2020)

- **Treasurer**

Free and Equal Rights Organization (2023-2025)

- **Youth Representative**

Indonesia Youth Diplomacy, Local Chapter Tanah Papua (2023-2024)

- **Partnership Division Papua Province**

Indonesia Youth Diplomacy, Local Chapter Tanah Papua (2024-2025)

- **Secretary**

LAMPIRAN 1
PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana cara Partai Politik memberikan dukungan dalam berkampanye?
2. Bagaimana cara Komisi Pemilihan Umum memberikan dukungannya dalam pemilihan kepala daerah?
3. Bagaimana cara Partai Politik menjalin hubungan?
4. *Lobbying* seperti apa yang dilakukan oleh KPU
5. Apakah kegiatan organisasi berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi pemilih laki-laki?
6. Kegiatan organisasi seperti apa yang disediakan atau diberikan oleh partai politik?
7. Koneksi seperti apa yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum dalam mencari koneksi?
9. Apakah tindak kekerasan memberikan manfaat dalam meningkatkan partisipasi pemilih laki-laki?
10. Adakah dampak yang terjadi apabila terdapat tindak kekerasan dalam pemilihan kepala daerah?

Lampiran 2



Wawancara bersama Bapak Roberth Sumaghai selaku Anggota Partai Politik Provinsi Papua Selatan.



Wawancara bersama Ibu Helda Ambay selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan.



Wawancara bersama Bapak Ismail Rumbewas, sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke.



Wawancara bersama saudara Elias Basik-Basik, sebagai Masyarakat Kabupaten Merauke.